TINJAUAN KRIMINOLOGIS *ABORTUS PROVOCATUS* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TERKAIT HAK FUNGSI REPRODUKSI KORBAN PERKOSAAN

Muhammad Zuhdi (M_zuhdi011191@yahoo.com)
Isti Ningrum Handayani (istingrum@rocketmail.com)¹

Abstrak

Aborsi menjadi salah satu perdebatan hangat dengan isu moral yang berdimensi sosial dan hukum, dimana setiap pandangan memiliki argumen yang berbeda satu dengan yang lain. Bagi kaum pendukung moral dan kehidupan memiliki argumen untuk memberikan kehidupan secara mutlak bagi bayi sama halnya dengan sang ibu. Sementara, kaum sosial berargumen bahwa perempuan memiliki hak untuk mengontrol tubuhnya termasuk kehamilannya. Hal ini yang melarbelakangi dilakukannya aborsi (*abortus provocatus*) oleh wanita korban perkosaan yang harus dilindungi. Rendahnya kesadaran dalam masalah serius tersebut, terutama untuk perempuan dan kemudian menyebabkan kematian ibu akibat diabaikannya hak-hak tentang kesehatan reproduksi yang berimbas pada meningkatnya angka kematian ibu. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini memperlihatkan sisi di luar aspek hukum seperti aspek moral dianggap *lex generalis*, sementara aspek hukum sebagai *lex specialis* dalam kasus aborsi.

Kata Kunci: *Abortus provocatus*, Alasan hukum, Korban perkosaan.

Abstract

*Abortion remains one of social, legal, and moral issues most hotly debated. Each perspective presents powerful pro-con arguments. The pro-life and moral arguments emphasize on preserving human life or giving absolute priority to the life of the unborn fetus and even over the life of the mother. However, pro-social choice group argues that a woman should have a right to control her body includes her pregnancy. It is background by the presence of abortion (*abortus provocatus*) performed woman the victim of rape that should be protected. The low of that awareness result in something serious problems, especially for the women and then cause maternal mortality to disregard about the health reproduction rights have consequences maternal mortality rate is high. Hence, this article presents the other side of legal argument, that is moral argument which can be regarded as *lex generalis*, while legal argument as *lex specialis* especially in abortion cases.*

Keywords: *Abortus provocatus*, Legal reasoning, The victim of rape.

A. PENDAHULUAN

Kesehatan dalam pelaksanaan pembangunan ditujukan dalam rangka peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama (Pasal 3 Undang-Undang Kesehatan). Pengaturan demikian mengisyaratkan gambaran hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*) dalam pelayanan kesehatan bagi tiap warga negara yang idealnya dilaksanakan secara adil tanpa adanya pembatas, bahkan pengecualian dan yang paling utama adalah diskriminasi gender.

¹ Muhammad Zuhdi dan Isti Ningrum Handayani, Mahasiswa Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 32A Ketingan, Surakarta, 57126

Bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, bahwa dalam implementasinya kaum perempuan sebagai bagian mayoritas kuantitas dalam masyarakat sering kali terdiskriminasi dalam penuntutan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Padahal sebagai kaum mayoritas, perempuan lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan. Perempuan juga bisa mengalami resiko kesehatan dari pekerjaan mereka yang dilatabelakangi alasan status kaum perempuan yang dipandang lebih rendah dan terbatasnya akses ke pendidikan.

Dalam Pasal 49 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara rinci disebutkan mengenai pemberian jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak khusus bagi kaum wanita berkaitan dengan fungsi reproduksi. Hak fungsi reproduksi dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) dijabarkan sebagai pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak (Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto dan G. Widiartana, 2001:15). Hak tersebut biladikaitakan dengan tindak pidana perkosaan memiliki hubungan yang erat sebagai konsekuensi logis sebagai *conditio sine qua non* berupa terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan bagi perempuan korban perkosaan.

Abortus provocatus sebagai bagian dari tindakan medis tertentu diizinkan dalam kasus adanya kompilasi yang mengancam jiwa ibu atau janin sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Undang-Undang Kesehatan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992) yang lama. Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Kesehatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada bulan September 2009 yang memperluas pengecualian aborsi yang sah kepada korban perkosaan.

Bertolak belakang dengan Undang-Undang Kesehatan, di Indonesia kebanyakan kasus aborsi lebih dipandang sebagai sebuah tindakan kriminal terhadap nyawa manusia tanpa memandang modus pelaku melakukan tindakan tersebut dan mengeneralisasi hukuman pada tiap pelaku aborsi. Terbukti dengan umumnya pengaturan mengenai siapa pihak yang dapat dijatuhi hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam pasal-pasal hanya menyebutkan seorang perempuan yang berusaha menggugurkan kandungannya dalam situasi yang tidak sah dapat dijatuhi sanksi pidana sampai dengan empat tahun penjara (Pasal 346) dan para individu, termasuk pekerja kesehatan, yang melakukan atau memfasilitasi aborsi ilegal dapat dipenjara sampai dengan 10 tahun (Pasal 349). Pengaturan hukum demikian memicu potensi tingginya angka pertumbuhan aborsi secara gelap dalam kondisi yang tidak aman. Menurut laporan MDG (*Millenium Development Goals*) pemerintah tahun 2007, aborsi secara tidak aman bertanggung jawab atas 11 persen mortalitas ibu di Indonesia (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses tanggal 9 Juni 2013 pukul 13.00 wib). Perundang-undangan di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung sejumlah ketentuan yang membatasi terhadap hak-hak seksual dan reproduktif wanita, utamanya perempuan korban perkosaan untuk memperjuangkan keberhakan dirinya atas fungsi reproduksinya dalam hal kehamilan. Namun stereotip terhadap tindakan aborsi sebagai bentuk kriminalisasi, membuat banyak perempuan dan gadis terdesak dalam situasi yang menuntun mereka untuk mencari aborsi ilegal yang tidak aman, sekalipun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka.

Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas, maka dalam penulisan ini Penulis akan menelaah beberapa permasalahan yang menjadi fokus Penulis yakni mengenai pengaturan tentang legalisasi tindakan pengguguran kandungan akibat tindak pidana perkosaan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tinjauan sisi kriminologis *abortus provocatus* bagi korban perkosaan sebagai pemenuhan hak khusus wanita atas fungsi reproduksi.

B. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

1. Tinjauan Hukum Tentang *Abortus Provocatus* Bagi Korban Perkosaan di Indonesia

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan menjatuhkan hukuman jangka panjang untuk perempuan, dan para individu, termasuk pekerja kesehatan, yang mencoba mencari dan/atau melakukan aborsi ilegal. Selain itu, Undang-Undang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa aborsi dilarang dipakai sebagai metode untuk mengatur kehamilan yang termaktub dalam Pasal 21 ayat (3).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 346 yang mengatur bahwa “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” dan Pasal 349 yang mengatur bahwa “jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346,

ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan". Lebih jauh lagi, Pasal 348 menyatakan bahwa (1) "barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". (2) "jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Ketentuan hukum pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memuat ketentuan sanksi yang diberikan pada pelaku aborsi baik pelaku langsung (wanita yang hamil) maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembantuan proses tersebut (tenaga medis). Akan tetapi dalam ketentuannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memuat adanya alasan pembenar atau legalisasi atas tindakan aborsi, terkesan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengeneralisasikan tiap-tiap pelaku aborsi tanpa memandang hak-hak yang dimiliki pelaku atas pilihannya melakukan tindakan tersebut. Hak-hak tersebut menyangkut hal yang dimuat dalam konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah" (Pasal 28B ayat (1)). Ketentuan demikian ini menyiratkan adanya hak setiap orang untuk dapat memilih untuk meneruskan kehamilan atau tidak (*abortus provocatus*) dalam hal kehamilan yang ditimbulkan diluar perkawinan yang sah, hal demikian tertuang dalam pengaturan konstitusi bahwa "setiap orang berhak...melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah".

Pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) memiliki keterkaitan yang erat dengan hak khusus yang dimiliki wanita berkaitan dengan fungsi reproduksi. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus memberi jaminan hukum atas hak-hak yang dimiliki wanita khususnya dalam bahasan ini berkaitan dengan fungsi reproduksi. Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan bahwa "wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita" dan ketentuan Pasal 49 ayat (3) yang mengatur tentang "hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum". Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi wanita adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan menyusui anak. Hak tersebut berkaitan dengan tindak pidana perkosaan memiliki hubungan yang erat sebagai konsekuensi logis terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan bagi perempuan korban perkosaan.

Pada tindak pidana perkosaan ini memiliki hubungan kausalitas yang erat kaitannya dengan fungsi reproduksi perempuan. Hubungan tersebut terjalin akibat konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki bagi korban perkosaan yang bersangkutan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia-pun tidak menyebutkan secara rinci apakah hak-hak reproduksi perempuan yang dilindungi itu termasuk kedalam hak untuk tidak meneruskan kehamilan yang merupakan hasil kejahatan, dalam hal ini hasil tindak pidana perkosaan (Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto dan G. Widiartana, 2001: hlm. 15). Disisi lain bila kehamilan pada korban perkosaan tersebut tetap dipertahankan maka memberi efek beban psikis maupun mental terhadap si calon ibu tersebut. Hal demikian dikarenakan besarnya tekanan ditimbulkan baik dari sisi *intern* maupun *ekstern* korban tersebut. Dari sisi internal korban, tekanan didapati akibat sisa-sisa kenangan kronologis kejadian perkosaan yang terekam dalam memori bawah sadar korban yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan tekanan mental pelaku atas trauma yang ditimbulkan dari kejadian tindak pidana tersebut, jelas tekanan pada sisi ini bersifat psikologis. Sedangkan dari sisi eksternal, ditimbulkan oleh tekanan dari lingkungan korban, baik akibat adanya stereotip negatif masyarakat yang melekat padanya akibat aib yang ia alami dan besarnya tekanan pada sisi ini dapat bertambah besar diakibatkan kembali melekatnya hal negatif lain berupa kehamilan diluar perkawinan yang sah yang mana merupakan konsekuensi logis adanya tindakan perkosaan yang ia derita.

Bertolak belakang dengan ketentuan pengaturan hak fungsi reproduksi yang ditujukan kepada setiap wanita tanpa terkecuali dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bahwa dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam ketentuannya mengatur bahwa akses terhadap layanan

kesehatan seksual dan reproduktif hanya diberikan kepada pasangan yang menikah dengan sah, yang artinya mengesampingkan orang-orang yang tidak menikah dari layanan tersebut.

Kemudian dalam Pasal 72 dan 78 Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduktif hanya disediakan untuk pasangan yang sah dan pasangan usia subur, bunyi klusula tersebut menyiratkan bahwa dalam prakteknya hanya pasangan yang menikah yang dapat mengakses ketetapan keluarga berencana tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyiratkan pengaturan tentang hak-hak reproduktif dan ketetapan tentang keluarga berencana ditujukan kepada pasangan suami istri (dalam perkawinan yang sah) untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa kebijakan keluarga berencana ditujukan untuk mendukung suami dan istri (atau calon suami dan istri) dalam mengambil keputusan yang benar tentang hak reproduksi mereka. Pasal 24 ayat (1) dan 25 ayat (2) menyatakan bahwa layanan kontrasepsi ditujukan kepada pasangan suami dan istri yang sah.

Ketetapan-ketetapan tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia, hal tersebut dilandasi alasan bahwa dalam isinya syarat dengan ketentuan yang mendiskriminasi melalui penggunaan landasan gender dan status perkawinan. Ketetapan-ketetapan tersebut memberi risiko kehamilan tak diinginkan kepada perempuan yang tidak menikah. Seperti dijelaskan di atas, kehamilan tak diinginkan bisa menuntun pada serentang risiko serius bagi perempuan tak menikah yang mungkin tak bisa mengakses layanan perawatan kesehatan reproduktif dan bisa mendapat stigma secara sosial. Sikap deskriminasi tersebut utamanya sangat berdampak pada korban perkosaan dimana selain ancaman fisik dan psikis yang ia alami dari tindakan perkosaan, ia juga mengalami ketakutan berupa pembuahan akibat penanaman benih yang berasal dari pelaku tindakan susila tersebut. Alhasil adanya konsekuensi logis tindakan perkosaan berupa kehamilan tersebut memicu perempuan korban perkosaan tersebut untuk mengambil jalan pintas berupa pengguguran atas kehamilan tersebut.

Aborsi dipandang sebagai suatu tindak pidana dalam kebanyakan kasus di Indonesia. Perempuan atau gadis yang berusaha menggugurkan kandungan (usia sah atas tanggung jawab pidana di Indonesia adalah delapan tahun), atau seorang pekerja kesehatan yang melakukannya, dapat dikenai hukuman masing-masing sampai empat dan 10 tahun penjara. Ketentuan pidana aborsi demikian di Indonesia sering kali dilakukan secara gelap dalam kondisi yang tidak aman. Menurut laporan MDG (*Millenium Development Goals*) pemerintah tahun 2007, aborsi secara tidak aman bertanggung jawab atas 11 persen mortalitas ibu di Indonesia (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (bahasa).pdf, diakses tanggal 9 Juni 2013 pukul 13.00 wib).

Abortus provocatus sebagai bagian dari tindakan medis tertentu diizinkan dalam kasus adanya komplikasi yang mengancam jiwa ibu atau janin sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Undang-Undang Kesehatan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992) yang lama. Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Kesehatan yang baru (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009) pada bulan September 2009 yang memperluas pengecualian aborsi yang sah kepada korban perkosaan (http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/013/2010/en/3913399f-5984-4e4c-97c9b9d-928d4c0be/asa2101_32010in.pdf, diakses tanggal 9 Juni 2013 pukul 13.00 wib).

Dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kesehatan berbunyi bahwa “larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”. Pengecualian *abortus provocatus* ini lebih lanjut diuraikan mengenai ketentuan yang menjadi prasyarat legalitas *abortus provocatus* yakni termaktub dalam Pasal 75 ayat (3) menguraikan bahwa “tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang” dan ayat (4) yakni bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pengecualian hukum atas *abortus provocatus* tersebut didasarkan atas adanya pengabaian hukum atas tidak diatur lebih lanjutnya mengenai penggantian atas hak yang terampas dari korban perkosaan. Padahal menurut Sudikno Mertokusumo dalam upaya penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi secara proposional yakni kepastian hukum atau *rechtssicherheit*, kemanfaatan atau *zweckmassigkeit*, dan keadilan atau *gerechtigkeits* (Sudikno Mertokusumo,

1991: hlm. 134-135). Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur soal tindak pidana perkosaan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun (Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto dan G. Widiartana, 2001: hlm. 96). Ketentuan pidana demikian hanya mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku perkosaan namun tidak mengatur lebih lanjut mengenai penggantian atas hak-hak korban perkosaan, pengaturan demikian secara semu menggambarkan permasalahan akan tuntas setelah penjatuhan pidana diberikan kepada pelaku perkosaan tersebut.

Atas dasar hal tersebut maka pembaruan ketentuan hukum khususnya pada Undang-Undang Kesehatan di Indonesia adalah sebagai sarana pengembalian hak-hak korban perkosaan yang telah terampas dan adanya pembaruan-pembaruan hukum dalam hal ini perlindungan korban tentunya tidak boleh dilepaskan dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum (*rechtspolitik*) menurut pendapat Bellefroid di dalam bukunya *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland* merupakan cabang ilmu hukum yang menyelidiki perubahan pada hukum yang ada sekarang ini untuk memenuhi tuntutan baru dari masyarakat dan terus mendorong pertumbuhan peraturan hukum yang berlaku saat ini *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* (Mr. J.P.H. Bellefroid, 1953: hlm. 17).

2. Tinjauan Kriminologis *Abortus Provocatus* Bagi Korban Perkosaan sebagai Pemenuhan Hak Khusus Wanita Atas Fungsi Reproduksi

Masalah kekerasan seksual berupa perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat manusia, secara patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) (Abdul Wahid dan M. Irfan, 2001: hlm. 55).

Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Abar dan Subardjono, yang mengatakan bahwa berdasarkan data usia pelaku tindak kejahatan perkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan sesungguhnya tidak mengenal batas usia (Dhian Ertanto, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Dhian-Ertanto-0810113265.pdf>, diakses tanggal 9 Juni pukul 13.00 wib). Demikian pula dengan korban, dimana setiap perempuan dapat menjadi korban dari kasus perkosaan tanpa mengenal usia, kedudukan, pendidikan, dan status (Ekandari Sulistyaningsih dan Fahturochman, 2002: hlm.3).

Adanya konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan (Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto dan G. Widiartana, 2001: hlm. 45), tidak menutup kemungkinan kehamilan terjadi pada korban perkosaan. Terjadinya kehamilan pada korban perkosaan cenderung memicu untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil tindak pidana perkosaan itu akan menambah derita batinnya dikarenakan melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut (Dhian Ertanto, , diakses tanggal 9 Juni pukul 13.00 WIB).

Menurut *Black's Law Dictionary* *abortion* atau aborsi mengandung dua arti sekaligus yakni:

"The spontaneous or artificially induced exulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion" (Henry Campbell Black MA, 1991: hlm. 1).

Dengan demikian, menurut *Black's Law Dictionary*, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata buka karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia (Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto dan G. Widiartana, 2001: hlm. 31). Sedangkan kata *abortus provocatus* menurut pandangan Musa Perdanakusuma adalah *abortus* yang terjadi karena perbuatan manusia. *Abortus provocatus* dapat terjadi karena:

- a. Dorongan oleh alasan medis, *abortus* yang didorong oleh alasan medis ini disebut *abortus provocatus therapeuticus*;
- b. Dorongan oleh alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum. *Abortus* ini biasa disebut sebagai *abortus provocatus criminalis* (Musa Perdanakusuma, 1984: hlm. 191).

Terkait adanya dua pengecualian menurut perundang-undangan Indonesia yang mengizinkan seseorang perempuan meminta aborsi dan pekerja kesehatan bisa melakukan aborsi secara

sah berkaitan dengan salah satu alasan yakni aborsi bagi korban perkosaan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang secara garis besar memuat tentang larangan melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan alasan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pengecualian demikian didasarkan atas dasar pemenuhan atas hak-hak dalam hak asasi manusia yang dimiliki kaum perempuan, khususnya mengenai hak yang saling berkaitan sebagai suatu kausalitas dengan tindakan perkosaan yakni berkaitan dengan hak fungsi reproduksi wanita yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Dikutip dari *Implication of the ICPD (International Congress Population and Development) Programme of Action*, 1994 bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup kesehatan reproduksi adalah:

- a. Kesejahteraan fisik mental dan sosial yang utuh.
- b. Segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya.
- c. Mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman
- d. Memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya, bilamana, dan berapa seringkah.
- e. Mempunyai akses terhadap cara-cara keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat menerimayang menjadi pilihan mereka dan metode-metode yang mereka pilih.
- f. Hak untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, yang memungkinkan para wanita selamat menjalani kehamilan dan melahirkan anak.
- g. Memberikan kesempatan terbaik kepada pasangan untuk memiliki bayi yang sehat (Sri Rahayu dan rekan, [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15332/1/ikm-des2005-%20\(9\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15332/1/ikm-des2005-%20(9).pdf), diakses tanggal 12 Juni 2013 pukul 22.00 WIB).

Abortus provocatus sebagai bagian dari tindakan medis tertentu diizinkan dalam kasus adanya kompilasi yang mengancam jiwa ibu atau janin sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang lama. Dalam bahasan ini *abortus provocatus* diperkenalkan pada korban perkosaan karena fisik maupun psikis korban yang tidak memungkinkan untuk mengandung, bahkan dikategorikan berbahaya akibat tindakan susila yang ia dapatkan. Tidak jarang pada korban perkosaan ditemukan cacat permanen pada bagian intim yakni organ reproduksi akibat tindakan *flagelantisme* (kelainan seksual).

Seperti pada kasus di Jakarta dengan korban bernama siska (disamarkan) gadis berusia 12 tahun telah mengalami perkosaan massal oleh puluhan pria tidak dikenal yang melakukan penjarahan di rumahnya. Setelah itu, bagian vagina korban ditusuk kawat. Lebih kejam lagi, sang pelaku memutar-mutar kawat di dalam vagina. Hari itu juga korban dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras dan lima belas hari kemudian korban meninggal akibat organ intimnya hancur (Bangkit, 1998: hlm. 8).

Kasus tersebut menyadarkan bahwa perkosaan sebagai bagian tindak pidana yang dikategorikan kejam dimana pelaku secara perseorangan atau massal tidak pandang melakukan tindak asusila tersebut baik kepada wanita yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur. Namun dalam implementasinya Negara hanya bertindak represif berupa penjatuhan hukuman pembedanaan bagi para pelaku perkosaan akan tetapi tidak memandang tindakan selanjutnya untuk pemulihan bahkan pengembalian hak-hak korban yang terampas. Seringkali korban perkosaan tidak begitu saja merasa aman setelah pelaku tersebut dijatuhi hukuman karena ada potensi pelaku untuk kembali ke masyarakat dan bahkan mengulangi perbuatan lampaunya kepada si korban. Lebih-lebih jika perkosaan tersebut menimbulkan beban baru bagi si korban yakni kehamilan, bukan saja fisik maupun psikis korban yang lemah namun kehamilan adalah bentuk perampasan kemerdekaan lain dari hak yang dimiliki korban pada fungsi reproduksinya yang menjadi dasar kuat untuk disahkannya *abortus* oleh korban tersebut.

Mengutip pendapat Mary Ann Warren, seorang liberal, melalui analisisnya tentang konsep kepribadian (*personhood*), menyimpulkan bahwa aborsi tidak akan dibenarkan bila janin adalah seorang *person* (pribadi). Warren kemudian mengusulkan kriteria seorang pribadi yang memiliki seluruh status moral. Seorang pribadi, menurut Warren, harus memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) memiliki kesadaran (*consciousness*) akan objek dan peristiwa-peristiwa baik internal maupun eksternal, termasuk memiliki kapasitas untuk merasa sakit; (2) kemampuan menalar, mempertimbangkan (*reasoning*) dan memecahkan problema yang baru dan relatif kompleks; (3)

self-motivated activity; (4) kemampuan untuk berkomunikasi (*a capacity to communicate*); (5) adanya konsep tentang diri (*self-concept*) dan kesadaran diri (*self-awareness*). Warren kemudian menyimpulkan bahwa janin tidak memiliki ciri-ciri kepribadian ini, meskipun secara potensial ia bisa menjadi seorang pribadi. Jadi, ia tidak memiliki status moral dan hak untuk hidup. Konsep kepribadian ini berasal dari hukum Romawi dan definisinya mengambil model individu dewasa dalam suatu konteks sosial. Akibatnya, aborsi dapat dibenarkan secara moral (Stanislaus Atalim, 2011: hlm. 315).

Selanjutnya, Njowito Hamdani dalam karya tulisnya berpendapat bahwa di luar negeri selain pada kehamilan karena kejahatan kesusilaan, *abortus provocatus* juga dapat dilakukan atas kehamilan karena *insectatau bloedschande* atau bila perempuan itu menolak kandungan (Njowito Hamdani, 1992: hlm. 209).

Kriminalisasi terhadap aborsi sendiri merupakan rintangan dalam mengakses layanan aborsi yang sah, sekalipun ada dua hal menurut hukum Indonesia yang memberikan hak kepada seorang perempuan untuk melakukan aborsi. Kriminalisasi menyebabkan adanya salah pemahaman bahwa semua aborsi adalah tindakan ilegal. Alih-alih diberi informasi dan akses bilamana perempuan memang memiliki hak, mereka malah dihadapkan pada situasi yang membuat mereka harus mencari informasi dan membuktikan bahwa mereka memiliki hak dengan melawan asumsi bahwa aborsi adalah tindakan pidana. Terlebih dari itu, dengan kriminalisasi aborsi, negara membuat banyak perempuan dan gadis terdesak dalam situasi yang menuntun mereka untuk mencari aborsi ilegal yang tidak aman, sekalipun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Studi-studi global menemukan bahwa seorang perempuan yang ingin menggugurkan kandungan akan tetap melakukannya tanpa memedulikan apakah itu sah atau tidak sah (*International Planned Parenthood Federation*, 2006: hlm. 1).

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa *abortus provocatus* sebagai suatu tindak pidana dalam kebanyakan kasus di Indonesia tetap memiliki pengecualiaan, utamanya pandangan mengenai legalisasi *abortus provocatus* sebagai bagian dari tindakan medis tertentu yang diizinkan dalam kasus adanya kompilasi yang mengancam jiwa ibu atau janin. Termasuk *abortus provocatus* yang diperkenankan pada korban perkosaan karena fisik maupun psikis korban yang tidak memungkinkan untuk mengandung, bahkan dikategorikan berbahaya akibat tindakan susila yang korban dapatkan. Hal demikian dikarenakan besarnya tekanan ditimbulkan baik dari sisi *intern* maupun *ekstern* si korban sebagai berikut:

1. Dari sisi internal korban tekanan didapati akibat sisa-sisa kenangan kronologis kejadian perkosaan yang terekam dalam di memori bawah sadar korban yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan tekanan mental pelaku atas trauma yang ditimbulkan dari kejadian tindak pidana tersebut, jelas tekanan pada sisi ini bersifat psikologis;
2. Dari sisi eksternal ditimbulkan oleh tekanan dari lingkungan korban, baik akibat adanya stereotip negatif masyarakat yang melekat padanya akibat aib yang ia alami dan besarnya tekanan pada sisi ini dapat bertambah besar diakibatkan kembali melekatnya hal negatif lain berupa kehamilan diluar perkawinan yang sah yang mana merupakan konsekuensi logis adanya tindakan perkosaan yang korban derita.

Terkait adanya dua pengecualian menurut perundang-undangan di Indonesia yang mengizinkan seseorang perempuan meminta aborsi dan pekerja kesehatan bisa melakukan aborsi secara sah berkaitan dengan salah satu alasan yakni aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang secara garis besar memuat tentang larangan melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan alasan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pengecualiaan demikian didasarkan atas dasar pemenuhan atas hak-hak dalam hak asasi manusia yang dimiliki kaum perempuan, khususnya mengenai hak yang saling berkaitan sebagai suatu kausalitas dengan tindakan perkosaan yakni berkaitan dengan hak fungsi reproduksi wanita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Wahid, M. Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*. Bandung: Rafika Aditama.
- Bellefroid, J.P.H. 1953. *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt N.V.
- Ekandari Sulistyaningsih, Fahturochman. 2002. *Dampak Sosial Psikologi Korban Perkosaan, Buletin Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Gajah mada (online), <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20SosialPsikologis%20Perkosaan.pdf>.
- Henry Campbell Black MA. 1991. *Black's Law Dictionar Sixth Edition*. St. Paul Min West Publishing Co.
- International Planned Parenthood Federation. 2006. *Death and Denial: Unsafe Abortion and Poverty*.
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Suryono Ekotama, Harun, Widiartana. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi. Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Univ. Atmajaya Yogyakarta.

Jurnal

- Stanislaus Atalim. 2011. "Perspektif Moralitas Dalam Perkara Aborsi". *Jurnal Yudisial*. Vol-IV Nomor 3. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Sumber Internet

- <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Dhian-Ertanto-0810113265.pdf>, diakses tanggal 9 Juni pukul 13.00 wib.
- [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15332/1/ikm-des2005-%20\(9\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15332/1/ikm-des2005-%20(9).pdf), diakses tanggal 12 Juni 2013 pukul 22.00 wib.
- [http://www.undp.or.id/pubs/docs/UNDP%20-%20%20MDGR%202007%20\(bahasa\).pdf](http://www.undp.or.id/pubs/docs/UNDP%20-%20%20MDGR%202007%20(bahasa).pdf), diakses tanggal 9 Juni 2013 pukul 13.00 wib.
- http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/013/2010/en/3913399f-5984-4e4c-97c9b9d928d4c0be/asa2101_32010in.pdf, diakses tanggal 9 Juni 2013 pukul 13.00 wib.